



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 185 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah mencakup analisis standar belanja;

b. bahwa untuk menjamin akurasi, kewajaran, dan keterpaduan data satuan harga di Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Evaluasi Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan analisis dan perbandingan data untuk menentukan standar harga serta standar belanja (ASB);
 - b. melakukan evaluasi hasil survey dan usulan dari SKPD perangkat daerah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai pertimbangan untuk penyusunan dan penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci;

- c. melaksanakan pembahasan Draf Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dibantu oleh Staf Sekretraiat yang mempunyai tugas:

- a. membuat Surat Keputusan untuk Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- b. mengumpulkan dan mempersiapkan administrasi serta mengarsipkan usulan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dari SKPD terkait;
- c. mengelompokan data usulan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dari SKPD terkait; dan
- d. menginput data usulan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

KELIMA : Tim Evaluasi Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci .

KEENAM : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas Pelaksanaan keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan kode rekening 5.02.03.2.01.01;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
2. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 185 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

TIM EVALUASI PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----|--|----|---|----|--|----|--|----|---|----|-----------------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------|----|---|-----|---|
| I. PENGARAH | : | BUPATI KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. KETUA | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KABUPATEN KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. WAKIL KETUA | : | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. SEKRETARIS | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGA DAERAH KABUPATEN
KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. ANGGOTA | : | <table border="0"><tr><td>1.</td><td>ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
KERINCI</td></tr><tr><td>2.</td><td>ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA
SETDA KABUPATEN KERINCI</td></tr><tr><td>3.</td><td>STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN</td></tr><tr><td>4.</td><td>STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK</td></tr><tr><td>5.</td><td>STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM</td></tr><tr><td>6.</td><td>INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI</td></tr><tr><td>7.</td><td>SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN
KERINCI</td></tr><tr><td>8.</td><td>KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI</td></tr><tr><td>9.</td><td>KEPALA BIDANG PBMD BPKPD
KABUPATEN KERINCI</td></tr><tr><td>10.</td><td>KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD
KABUPATEN KERINCI</td></tr></table> | 1. | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
KERINCI | 2. | ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA
SETDA KABUPATEN KERINCI | 3. | STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN | 4. | STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | 5. | STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM | 6. | INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI | 7. | SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN
KERINCI | 8. | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI | 9. | KEPALA BIDANG PBMD BPKPD
KABUPATEN KERINCI | 10. | KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD
KABUPATEN KERINCI |
| 1. | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN
KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA
SETDA KABUPATEN KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SDM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN
KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | KEPALA BIDANG PBMD BPKPD
KABUPATEN KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKPD
KABUPATEN KERINCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

